

BAB II

PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI

Halaman 45-58

Ringkasan materi ini kami buat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah

*Akuntansi Internasional. Materi ini kami ambil dari sumber buku 1
International Accounting Edisi Ke Enam Karya Frederick D.S. Choi dan Gary
K. Meek*



Disusun Oleh :

Amelia Puji Lestari 2414190001

Nada Prihatini 2314190047

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y A I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PRPGRAM STUDI AKUNTANSI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB II PENJELASAN MATERI.....	1
A. Perkembangan dan Klasifikasi (Frederick & Gary, 2010; Hal 45-46)	1
B. Perkembangan (Frederick & Gary, 2010; Hal 46-53).....	1
C. KLASIFIKASI (Frederick & Gary, 2010; Hal 53 - 54).....	7
D. Empat Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi.....	7
E. Sistem Hukum: Akuntansi Hukum Umum versus Kodifikasi Hukum (Frederick & Gary, 2010; Hal 54 - 56)	8
F. Sistem Praktik: Akuntansi Penyajian Wajar Versus Kepatuhan Hukum (Frederick & Gary, 2010; Hal 56 - 58).....	9
G. STUDI KASUS 2-1 Apakah Klasifikasi Akuntansi Telah Ketinggalan Zaman ?	11
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB II

PENJELASAN MATERI

A. Perkembangan dan Klasifikasi

Akuntansi harus memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Sejarah akuntansi dan para akuntan memperlihatkan perubahan secara terus-menerus. Industrialisasi dan pembagian kerja memerlukan adanya analisis biaya dan akuntansi manajemen. Timbulnya perusahaan modern mendorong pelaporan keuangan dan auditing secara periodik. Akuntansi memberikan informasi pengambilan keputusan kepada pasar surat berharga umum domestik dan internasional yang sangat besar.

Kita akan dapat memahami dengan lebih baik sistem akuntansi suatu negara dengan mengetahui faktor-faktor dasar yang memengaruhi perkembangannya. Tentu saja akuntansi berbeda dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia dan pengetahuan mengenai faktor perkembangan membantu untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Dengan kata lain, perbedaan-perbedaan yang terlihat serta persamaan-persamaan dapat dijelaskan melalui faktor-faktor tersebut. Oleh karena akuntansi bereaksi terhadap lingkungannya, lingkungan budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang berbeda-beda menghasilkan sistem yang serupa pula.

Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda-beda. Kita juga dapat menganalisis apakah sistem-sistem tersebut cenderung menyatu atau berbeda. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Klasifikasi mengungkapkan struktur dasar dimana anggota kelompok memiliki kesamaan dan apa yang membedakan kelompok-kelompok yang beraneka ragam satu sama lain. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 45-46)

B. Perkembangan (Hal 46-53)

Standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar-bangsa.

Kami meyakini bahwa delapan faktor berikut ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan akuntansi.

1. Sumber Pendanaan

Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (*profitabilitas*) dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi para peminjam. Karena lembaga keuangan memiliki akses terhadap informasi apa saja yang diinginkan. Contohnya adalah Jepang dan Swiss. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 46)

2. Sistem Hukum

Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: kodifikasi hukum (sipil) dan hukum umum (kasus). Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dan kode Napoleon. Dalam negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin-Romawi, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi standar dan prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai di sana. Dengan demikian, di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakupi banyak prosedur. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode lengkap. Tentu saja, terdapat hukum dasar, tetapi cenderung tidak terlalu detail dan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan sistem kodifikasi hukum.

Hal ini mendorong usaha coba-coba dan memungkinkan penerapan pertimbangan. Hukum umum diambil dari kasus hukum Inggris. Pada kebanyakan negara hukum umum, aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif. Kecuali untuk ketentuan dasar yang luas, kebanyakan aturan akuntansi tidak digabungkan secara langsung ke dalam hukum dasar. Kodifikasi hukum (kode hukum) akuntansi cenderung terpaku pada bentuk (formal) legalnya saja, sementara hukum akuntansi yang lebih umum cenderung terpaku pada muatan (isi) ekonominya. Sebagai contoh, sewa guna usaha di bawah aturan hukum umum biasanya tidak dikapitalisasi. Sebaliknya, sewa guna usaha di bawah hukum umum pada dasarnya dapat dikapitalisasi jika ia menjadi bagian dari pembelian property. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 46-47)

3. Perpajakan

Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun

mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Dalam kasus ini, sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Jerman dan Swedia.

Di negara lain seperti Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda: laba kena pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dengan hukum pajak. Tentu saja, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Penilaian persediaan menurut Masuk Terakhir Keluar Pertama (*last-in, first-out-LIFO*) di Amerika Serikat merupakan satu contoh. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 47)

Tampilan 2-1 Negara – negara yang Menganut Kodifikasi Hukum dan Hukum Umum

48 AKUNTANSI INTERNASIONAL

Tampilan 2-1 Negara-negara yang Menganut Kodifikasi Hukum dan Hukum Umum

Kode hukum—Sumber dari Prancis	Belanda	Hukum umum
Afrika	Portugis	Afrika
Mesir	Spanyol	Kenya
Amerika	Kode hukum—Sumber dari Jerman	Nigeria
Argentina	Asia	Afrika Selatan
Brasil	Jepang	Zimbabwe
Cile	Korea Selatan	Amerika
Kolombia	Taiwan	Kanada
Ekuador	Eropa	Amerika Serikat
Meksiko	Austria	Asia
Peru	Republik Ceko	Hong Kong
Uruguay	Jerman	India
Venezuela	Hungaria	Israel
Asia	Republik Slovakia	Malaysia
Indonesia	Swiss	Pakistan
Yordania	Kode hukum—Sumber dari Skandinavia	Singapura
Filipina	Eropa	Sri Lanka
Turki	Denmark	Thailand
Eropa	Finlandia	Australasia
Belgia	Islandia	Australia
Prancis	Norwegia	Selandia Baru
Yunani	Swedia	Eropa
Italia		Irlandia
Luksemburg		Inggris

SUMBER: Diadaptasi dari Rafael La Porta, Florencio Lopez de Salines, Andrei Shleifer, dan Robert W. Vishny, "Law and Finance", *Journal of Political Economy* 106, no. 6, 1998, hal. 1142–1143; dan David Alexander dan Simon Archer, *European Accounting Guide*, (New York: Aspen, 2003), edisi ke-5.

Sumber gambar: buku akuntansi internasional karya Frederick & Gary Hal 48

4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan (*double-entry*) yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan (*renaissance*) lainnya. Kolonialisme Inggris mengeksport akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris.

Banyak negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena dipaksakan kepada negara-negara tersebut (seperti India) atau karena pilihan mereka sendiri (seperti negara-negara Eropa Timur sekarang meniru sistem akuntansi menurut aturan Uni Eropa [EU]). Integritas ekonomi melalui pertumbuhan perdagangan dan arus modal internasional merupakan pendorong kuat akan konvergensi standar akuntansi. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 48)

5. Inflasi

Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi sering kali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereka dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an, AS dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 49)

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini memengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Sebagai contoh, kompensasi eksekutif perusahaan berbasis saham atau sekuritisasi aset merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perekonomian dengan pasar modal yang kurang berkembang. Saat ini, banyak perekonomian industri berubah menjadi perekonomian jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru, seperti penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia, semakin berkembang. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 49)

7. Tingkat Pendidikan

Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit (*sophisticated*) akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. Meksiko adalah salah satu contoh negara di mana permasalahan ini telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lainnya, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Hal terakhir inilah yang saat ini sedang diterapkan oleh Cina. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 49)

Beberapa dari tujuh variabel pertama ini sangat berhubungan. Sistem hukum umum berawal di Inggris dan kemudian diekspor ke Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Keempat negara ini memiliki pasar modal yang sangat maju yang mendominasi orientasi pelaporan keuangan di negara tersebut. Akuntansi keuangan dan pajak bersifat terpisah. Sebaliknya, kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental dan Jepang memiliki sistem kodifikasi hukum dan bergantung pada perbankan atau pemerintah untuk memperoleh kebanyakan pendanaan. Aturan akuntansi di sana pada umumnya sesuai dengan hukum pajak. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 49)

Sistem hukum umum menekankan hak pemegang saham dan menawarkan perlindungan investor yang lebih baik dibandingkan kodifikasi hukum. Hasilnya adalah pasar ekuitas yang kuat berkembang di negara-negara hukum umum dan pasar ekuitas yang lemah berkembang di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum. Perpajakan merupakan fungsi akuntansi yang penting di setiap negara yang mengenakan pajak penghasilan perusahaan. Aturan pajak akan mendominasi di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum atau yang berbasis kredit, di mana akuntansi untuk perpajakan dan pelaporan keuangan akan sama. Dua orientasi akuntansi yang berkembang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan ini. Hal yang satu berorientasi pada penyajian wajar posisi keuangan dan hasil operasi, sedangkan yang satu lagi dirancang untuk memenuhi ketentuan hukum dan hukum pajak. (Meek & Choi, n.d.) (hal 50)

8. Budaya

Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara (seperti sistem hukum). Hofstede mendasari empat dimensi budaya nasional (nilai sosial), yaitu (1) individualisme, (2) jarak kekuasaan, (3) penghindaran ketidakpastian, dan (4) maskulinitas. Analisis dilakukan berdasarkan pada data yang berasal dari para karyawan sebuah perusahaan multinasional besar dari AS yang beroperasi di 40 negara yang berbeda. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 50)

Individualisme (versus kolektivisme) merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung (saya versus kita). Jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dan dapat diterima. Penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Maskulinitas (versus feminitas) adalah sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat (nilai-nilai maskulin yang tradisional) ditekankan daripada hubungan dan perhatian (nilai-nilai feminine yang tradisional). Beberapa ahli sekarang menyebutnya orientasi pencapaian. (Meek & Choi, n.d.) (Hal 50-51)

Berdasarkan hasil analisis Hofstede, Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan empat

dimensi nilai akuntansi yang memengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu:

1. Profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian: preferensi terhadap pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.

Preferensi terhadap pertimbangan profesional yang independen merupakan hal yang konsisten dengan preferensi atas kerangka sosial yang terkait secara longgar di mana lebih banyak penekanan terhadap kebebasan, kepercayaan dalam bermain secara adil, dan aturan sedikit mungkin di mana pertimbangan profesional yang berbeda-beda cenderung lebih mudah untuk ditoleransi.. [P]rofesionalisme lebih mungkin diterima di suatu masyarakat dengan jarak kekuasaan yang lebih kecil di mana terdapat perhatian atas hak yang sama, di mana orang pada berbagai tingkat kekuasaan merasa tidak terlalu terancam dan lebih siap untuk memercayai orang, di mana terdapat kepercayaan akan adanya kebutuhan untuk membenarkan penegakan hukum dan aturan. (Hal 51)

2. Keseragaman versus fleksibilitas: preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Preferensi terhadap keseragaman bersifat konsisten dengan preferensi terhadap penghindaran ketidakpastian kuat yang menimbulkan perhatian terhadap hukum dan aturan dan kode etik yang kaku, kebutuhan terhadap aturan dan regulasi tertulis, penghormatan terhadap kesesuaian dan pencarian kebenaran dan nilai yang absolut dan utama. [Keseragaman] juga konsisten dengan preferensi terhadap kolektivisme kerangka sosial yang terkait dengan ketat, kepercayaan pada organisasi dan tatanan, dan penghormatan terhadap norma-norma kelompok.. [K]eseragaman juga lebih mudah difasilitasi oleh suatu masyarakat dengan jarak kekuasaan yang besar di mana penerapan hukum dan kode karakter yang seragam lebih mudah untuk diterima. (Hal 51-52)

3. Konservatisme versus optimisme : suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan, daripada memilih pendekatan yang sekedar optimis namun berisiko.

Preferensi terhadap laba yang lebih konservatif merupakan hal yang konsisten dengan penghindaran ketidakpastian yang kuat, perhatian terhadap keamanan dan kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang hati-hati terhadap peristiwa masa depan. Penekanan terhadap pencapaian dan kinerja individu dapat mendorong pengukuran yang kurang konservatif. (Hal 52)

4. Kerahasiaan versus transparansi : preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha berdasarkan kebutuhan untuk tahu dan kesediaan mengungkapkan informasi kepada publik. Preferensi terhadap kerahasiaan sejalan dengan penghindaran ketidakpastian yang kuat, kebutuhan menghindari konflik dan kompetisi serta mempertahankan keamanan. Masyarakat dengan karakter kekuasaan tinggi cenderung membatasi informasi untuk mempertahankan ketidaksetaraan dalam kekuasaan. Sebaliknya, masyarakat yang menekankan kualitas hidup, masyarakat, dan lingkungan cenderung lebih terbuka, khususnya terhadap informasi sosial. (Hal 52) (Meek & Choi, n.d.)

Tampilan 2-2 memperlihatkan bagaimana nilai akuntansi Gray berhubungan dengan dimensi budaya Hofstede (Frederick & Gary, 2010; Hal 53)

BAB 2 Perkembangan dan Klasifikasi 53

Tampilan 2-2 Hubungan antara Nilai-nilai Akuntansi dan Dimensi Budaya

Dimensi Budaya (Hofstede)	Nilai-nilai Akuntansi			
	Profesionalisme	Keseragaman	Konservatisme	Kerahasiaan
Individualisme	+	-	-	-
Penghindaran Ketidakpastian	-	+	+	+
Jarak Kekuasaan	-	+	•	+
Maskulinitas	•	•	-	-

Catatan: "+" menunjukkan hubungan langsung antarvariabel terkait; "-" menunjukkan hubungan yang berkebalikan; "•" menunjukkan bahwa sifat hubungan tidak dapat ditemukan. Gray membuat hipotesis bahwa individualisme dan penghindaran ketidakpastian akan sangat memengaruhi akuntansi, diikuti oleh jarak kekuasaan dan maskulinitas.

Sumber gambar: buku akuntansi internasional karya Frederick & Gary Hal 53

C. KLASIFIKASI (Hal 53 - 54)

Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua kategori :

- Berdasarkan pertimbangan : bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman.
- Secara empiris : menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia.

D. Empat Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi

Mueller pada pertengahan tahun 1960-an mengidentifikasi empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara Barat yang ekonominya berorientasi pasar.

- (1) Pendekatan makroekonomi, praktik akuntansi dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Perusahaan umumnya mengikuti kebijakan nasional bukan yang memimpin. Contohnya, kebijakan lapangan

kerja yang stabil mendorong praktik perataan laba. Negara juga dapat mengizinkan penghapusan pengeluaran modal secara cepat pada industri tertentu untuk mendorong perkembangannya. Akuntansi di Swedia berkembang dari pendekatan makroekonomi.

(2) Pendekatan mikroekonomi, akuntansi berkembang berdasarkan prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya pada perusahaan secara individual dengan tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan mempertahankan modal fisik yang dimiliki. Perusahaan perlu memisahkan modal dari laba untuk mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas usaha. Pengukuran ini didasarkan pada biaya penggantian. Akuntansi di Belanda berkembang dari mikroekonomi. (Hal 54)

(3) Pendekatan disiplin independen, akuntansi berkembang secara bertahap dari pertimbangan, coba-coba dan kesalahan. Akuntansi dianggap sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis, bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi. Bisnis menghadapi kerumitan dan ketidakpastian yang terjadi melalui pengalaman, praktik, dan intuisi. Akuntansi berkembang dengan cara yang sama. Contoh, laba dipandang bermanfaat secara praktis dan diungkapkan secara pragmatis untuk kebutuhan pengguna. Akuntansi berkembang secara independen di Inggris dan Amerika Serikat.

(4) Pendekatan Seragam, akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat kendali administratif pemerintah pusat. Keseragaman pengukuran, pengungkapan, dan penyajian memudahkan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk mengukur kinerja, mengalokasikan sumber daya, mengumpulkan pajak, dan mengendalikan harga. Contoh, Prancis menggunakan pendekatan akuntansi nasional yang seragam.

E. Sistem Hukum: Akuntansi Hukum Umum versus Kodifikasi Hukum (Frederick & Gary, 2010; Hal 54 - 56)

Akuntansi dapat diklasifikasikan sesuai hukum suatu negara. Pandangan ini telah mendominasi selama kurang lebih 25 tahun terakhir.

(1) Akuntansi dalam negara hukum umum berorientasi pada “penyajian wajar”, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisah antara keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditujukan untuk kebutuhan investor luar. Penentuan standar akuntansi umumnya merupakan aktivitas sektor swasta dengan peran penting profesi akuntansi. Akuntansi hukum umum sering disebut “Anglo Saxon”, “Inggris-Amerika”, atau “berdasarkan mikro”. Akuntansi hukum umum berawal dari Inggris kemudian diekspor ke negara seperti Australia, Kanada, Hongkong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat.

(2) Akuntansi dalam negara kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, larangan pengungkapan yang kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Bank atau pemerintah mendominasi sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditujukan untuk perlindungan kreditor. Penentuan standar akuntansi cenderung merupakan aktivitas sektor publik, dengan sedikit pengaruh profesi akuntansi. Akuntansi kodifikasi hukum sering disebut “kontinental”, “legalistik”, atau “seragam secara makro” dan ditemukan di sebagian besar negara Eropa kontinental dan bekas koloninya di Afrika, Asia dan Amerika.

Sistem hukum suatu negara dan sistem keuangan negara memiliki hubungan sebab-akibat. Suatu sistem legal dalam hukum umum menekankan hak pemegang saham dan menawarkan perlindungan yang lebih kuat kepada investor daripada sistem kodifikasi hukum. Hasilnya adalah pasar modal yang kuat berkembang di negara hukum umum dan pasar modal yang lemah berkembang di negara kodifikasi hukum. Perusahaan di negara hukum memperoleh modal melalui penawaran publik saham kepada sejumlah investor. Karena investor memiliki posisi wajar terhadap perusahaan, mereka membutuhkan informasi akuntansi yang mencerminkan kinerja operasi dan posisi keuangan dengan akurat. Pengungkapan publik mengurangi informasi yang tidak seimbang (asimetris) antara perusahaan dan investor.

Sebaliknya, di negara kodifikasi hukum kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada keluarga, perusahaan lain dan bank komersial besar. Sumber modal utama dari pemerintah atau pinjaman bank sehingga utang lebih penting dibandingkan di negara hukum umum. Pengukuran akuntansi yang konservatif melindungi kreditor bila terjadi gagal bayar. Kreditor utama, investor ekuitas, buruh, pemasok dan pelanggan yang penting memperoleh kursi dalam dewan direktur. Karena permintaan informasi dipenuhi melalui komunikasi pribadi, permintaan terhadap pengungkapan publik relatif lebih sedikit. Laba akuntansi merupakan dasar penentuan pajak penghasilan terutang, penentuan dividen dan bonus karyawan, sehingga menimbulkan tekanan untuk melakukan perataan jumlah laba dari tahun ke tahun. (Meek & Choi, n.d.)

F. Sistem Praktik: Akuntansi Penyajian Wajar Versus Kepatuhan Hukum (Hal 56 - 58)

Banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional menjadi semakin hilang. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan.

(1) Pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan semakin berkembang di seluruh dunia. Modal semakin global sehingga menuntut adanya standar laporan keuangan yang diakui secara mendunia. Penyeragaman standar laporan keuangan dapat mengurangi biaya penyesuaian terhadap aturan keuangan yang berbeda-beda. Penyatuan pasar modal dunia menjadikan Dewan Standar Akuntansi Internasional berperan dalam menetapkan standar keuangan di

berbagai negara. Perkembangan pasar saham juga menjadi prioritas di negara yang beralih dari perekonomian terpusat menjadi perekonomian berorientasi pasar, seperti Republik Ceko dan Cina.

(2) Pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum. Satu laporan mengikuti ketentuan pelaporan keuangan domestik lokal, sedangkan laporan lainnya menggunakan prinsip akuntansi dan pengungkapan yang ditujukan kepada investor internasional. Sejak 2005, perusahaan Eropa yang terdaftar diwajibkan mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional dalam laporan keuangan terkonsolidasi. Beberapa negara seperti Prancis dan Jerman memiliki kode hukum yang tidak mengizinkan laporan ganda bagi perusahaan tertentu, namun menerapkan laporan keuangan dengan standar IFRS (International Financial Reporting Standard). Dengan demikian, perlu dibedakan praktik akuntansi tingkat nasional dan tingkat trans-nasional.

(3) Beberapa negara yang menganut kodifikasi hukum, khususnya Jerman dan Jepang, mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sektor swasta yang profesional dan independen.

Perubahan tersebut membuat proses penetapan standar menjadi mirip dengan negara-negara hukum umum, seperti Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, hal ini dilihat sebagai suatu cara untuk lebih aktif memengaruhi agenda IASB, serta menunjukkan bahwa kerangka kerja selain sistem hukum diperlukan untuk mengklasifikasikan akuntansi di seluruh dunia.

Klasifikasi penyajian wajar versus kepatuhan hukum menjelaskan akuntansi di dunia sekarang. Perbedaannya berpengaruh terhadap berbagai permasalahan akuntansi, seperti :

(1) Depresiasi, dapat ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan aset selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum). (2) Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap dapat diperlakukan seperti sewa operasi (kepatuhan hukum). (3) Biaya pensiun dapat diakui saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau berdasarkan dasar dibayar saat berhenti bekerja (kepatuhan hukum). Perbedaan akuntansi pajak dan keuangan juga dapat menimbulkan masalah pajak penghasilan tangguhan.

Masalah lainnya adalah penggunaan cadangan untuk meratakan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pada tahun-tahun yang baik, beban tambahan dicatat sebagai cadangan, sedangkan pada tahun-tahun yang kurang baik, cadangan dihapuskan untuk meningkatkan laba. Praktik ini meratakan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dan bertentangan dengan penyajian wajar, sehingga lebih jarang dilakukan di negara-negara dengan penyajian wajar.

Penyajian wajar dan substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) merupakan ciri utama akuntansi hukum umum. Akuntansi umum berorientasi pada kebutuhan pengambilan keputusan oleh investor luar. Laporan keuangan membantu investor menilai kinerja manajemen serta memperkirakan arus kas

dan keuntungan di masa depan. IFRS ditujukan pada penyajian wajar dan relevan bagi perusahaan yang mengandalkan pasar modal internasional. Akuntansi penyajian wajar ditemukan di Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara yang dipengaruhi oleh ikatan politik dan ekonomi dengan negara tersebut.

Akuntansi kepatuhan hukum dirancang untuk memenuhi ketentuan pemerintah, seperti perhitungan laba kena pajak dan rencana makroekonomi pemerintah. Jumlah laba dapat menjadi dasar pembayaran dividen dan bonus. Pengukuran dengan standar konservatif membuat pajak, dividen, dan pembayaran bonus lebih stabil. Akuntansi kepatuhan hukum tetap digunakan dalam laporan keuangan perusahaan individual di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, sedangkan laporan konsolidasi menerapkan penyajian wajar.

Pada akhirnya, integrasi pasar modal dunia menjadi pengaruh penting dalam perkembangan akuntansi. Perkembangan ini mendorong tren menuju akuntansi penyajian wajar, terutama untuk laporan konsolidasi, serta mendorong aktivitas Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Keputusan Uni Eropa atas “IFRS 2005”. Hal ini menyebabkan analisis laporan keuangan semakin bersifat global.

G. STUDI KASUS 2-1 Apakah Klasifikasi Akuntansi Telah Ketinggalan Zaman ?

1. Apakah klasifikasi akuntansi terlalu sederhana dan tidak relevan dalam dunia saat ini? Apakah upaya mengklasifikasikan akuntansi sudah tidak berguna dan ketinggalan zaman?

Jawab : Menurut saya, klasifikasi akuntansi masih relevan, meskipun memang merupakan penyederhanaan dari sistem akuntansi yang kompleks. Klasifikasi membantu memahami persamaan dan perbedaan karakteristik akuntansi antarnegara. Walaupun globalisasi dan IFRS telah membuat praktik akuntansi semakin serupa, setiap negara masih memiliki karakteristik akuntansi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, ekonomi, budaya, sumber pendanaan, dan perpajakan. Oleh karena itu, klasifikasi akuntansi tidak dapat dianggap sudah tidak berguna atau ketinggalan zaman.

2. Jika laporan keuangan perusahaan multinasional semakin mirip, apa relevansinya terhadap klasifikasi akuntansi dan faktor apa yang menyebabkan hal tersebut?

Jawab : Menurut saya, pendapat bahwa perusahaan multinasional besar semakin memiliki praktik pelaporan yang mirip juga benar. Perusahaan yang beroperasi di pusat ekonomi seperti London, New York, dan Tokyo membutuhkan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh investor internasional. Kesamaan praktik tersebut memberikan beberapa manfaat:

- meningkatkan keterbandingan laporan keuangan;
- memudahkan perusahaan memperoleh modal dari pasar internasional;
- mengurangi biaya penyusunan laporan yang berbeda-beda;

- meningkatkan kepercayaan investor;
- mempermudah analisis kinerja perusahaan di berbagai negara.

Namun, perusahaan kelas dunia tetap harus menyesuaikan diri dengan regulasi lokal. Perbedaan aturan pajak, kewajiban hukum, tata kelola, dan kebiasaan bisnis masih dapat memengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Meek, G. k, & Choi, F. D. S. (n.d.). *International Accounting*.